

PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DEMOKRAT (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)

DEWI KURNIASIH, TATIK ROHMAWATI
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia

Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi partai politik salah satunya adalah komunikasi politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang ada di Indonesia melaksanakan fungsi komunikasi politik. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi politik di Partai Demokrat mengalami hambatan salah satunya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah karena anggota partai sebagai komunikan harus mampu memahami dan mengerti benar apa yang disampaikan oleh pimpinan sebagai komunikator.

Dari penelitian ini dapat dikatakan pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung pada pemilihan Walikota Bandung terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu: komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan *feed back*. Partai Demokrat sebagai partai politik yang tergolong besar, dimana didukung oleh kader partai yang cukup banyak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota partai yang kualitasnya masih rendah. Hal ini membutuhkan pendidikan politik yang diadakan dengan jadwal tersendiri secara khusus tidak hanya dimasukkan dalam salah satu agenda rapat anggota.

Kata Kunci : partai politik, komunikasi politik, fungsi partai politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan aspek lainnya telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir. Perubahan sistem yang multidimensi seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik di pusat maupun di daerah, yang menuntut adanya suatu pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis sesuai dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Dampak reformasi terhadap bidang

politik adalah tumbuh kembangnya suatu sistem politik itu sendiri terhadap tuntutan perubahan, seperti: bentuk negara, sistem pemerintahan maupun sistem kepartaian. Salah satu implikasi dari reformasi tersebut adalah perubahan sistem kepartaian, segala aspek kebebasan berpolitik telah memberikan kesempatan pada aktor reformasi untuk mensosialisasikan dan merekrut anggota hingga membentuk suatu organisasi kemasyarakatan maupun partai politik, yang merupakan prasyarat negara yang demokratis. Alasan utama terhadap pembentukan partai politik di suatu negara adalah berdasarkan kepada pandangan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut timbul atas dasar hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat dalam menentukan

arah kehidupan bangsa dan negaranya, demi terciptanya iklim politik yang kondusif.

Dewasa ini sulit membayangkan adanya negara modern tanpa eksistensi partai politik. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompetensi untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengatur tentang partai politik di Indonesia, menyatakan bahwa partai politik tidak hanya dibentuk oleh lima puluh orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 21 tahun. Akan tetapi pembentukannya dinyatakan dalam bentuk keputusan akta notaris, dan di dalamnya memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan baik tingkat pusat, wilayah, maupun di daerah harus terdaftar dalam keputusan Departemen Kehakiman, khususnya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan partai politik.

Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Rush dan Allthof (1995: 225) bahwa pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan *audiens* atau pendengar".

Sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan. Pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media

elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan.

Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern. Menurut Ramlan Surbakti (1992:199) Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi atau pesan. Di sini mereka sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi tersebut secara tepat terhadap *audiens* atau pendengar, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dari atas ke bawah.

Partai politik sebagai alat politik seseorang atau sekelompok orang untuk menduduki kursi pimpinan partai, seringkali dilakukan dengan cara muktamar, *convensi* bahkan sampai pada tahap *lobby* dan *vote* dengan suara terbanyak yang mewakili sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang tersebar di penjuru Indonesia. Seperti halnya terdapat Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau bahkan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dalam melakukan kontrak politik ke daerah guna mencari figur calon pemimpin partai. Partai Demokrat adalah salah satu partai peserta pemilu baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Kiprah Partai Demokrat sebagai partai politik yaitu ingin memberikan perubahan bagi negeri ini. Agenda partai yaitu untuk mencari seorang figur yang diyakini dan memiliki bakat kepemimpinan dilakukan dengan mencari ke pelosok daerah. Untuk menciptakan seorang figur pemimpin partai, setiap partai politik peserta pemilu selalu berusaha keras untuk menciptakan sistem politik yang baik agar partai dapat menyerap

dan menyampaikan pesan/aspirasi, cita-cita dan kepentingan lainnya melalui figur calon pemimpin partainya.

Pada pemilihan umum legislatif 2009 mengantarkan Partai Demokrat menguasai kursi DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Dari 50 kursi yang tersedia, partai itu menempatkan 20 legislator. Pada periode sebelumnya, wakil Partai Demokrat di Kota Bandung hanya mengisi 6 kursi. Naiknya suara Partai Demokrat di Kota Bandung dipengaruhi sosok mulai dari adanya figur dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Menurut dia, sosok SBY sangat melekat dalam diri partainya sehingga membuat perolehan suara terangkat.

Saat ini Presiden SBY sudah sampai pada puncak kekuasaannya dan menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2014 kini popularitasnya menurun. Secara alami, apabila seorang pemimpin mencapai titik kulminasi di puncak politik, apabila tidak didukung prestasi sosial-ekonomi, maka kemunduran dan kemerosotan hanya menunggu waktu. Termasuk yang terjadi pada Presiden SBY dimana kharisma dan citranya menurun (*decline*) secara alamiah, demikian halnya Partai Demokrat yang diusungnya. Elektabilitas partai demokrat berdasarkan Hasil dari survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyingkapkan, elektabilitas Demokrat melorot di urutan ke empat dengan angka 7,1 persen. Padahal, hasil survei CSIS ketika Anas masih menjabat di Juli 2012, elektabilitas Demokrat masih 11,1 persen (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=291181:elektabilitas-demokrat-terus-menurun&catid=17:politik&Itemid=30)

Penurunan elektabilitas Partai Demokrat terjadi pula pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat dengan kekalahan Dede Yusuf yang diusung partai demokrat. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh komunikasi partai. Pelaksanaan komunikasi politik di Dewan Pimpi-

nan Cabang (DPC) Demokrat Kota Bandung seringkali menemukan masalah yang menghambat proses komunikasi politik itu sendiri, misalnya terjadi miskomunikasi antara DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kota Bandung secara internal dalam menyampaikan program kerja atau kegiatan. Hal tersebut dapat terjadi pula pada Pemilihan Walikota Bandung yang digelar pada tanggal 23 Juni 2013. Permasalahan di atas menurut asumsi penulis ada kaitannya dengan fungsi komunikasi yang dilakukan partai demokrat masih kurang. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: "pelaksanaan fungsi komunikasi politik Partai Demokrat (studi pemilihan walikota Bandung tahun 2013)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi politik dari Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan komunikasi politik di Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan komunikasi politik di Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi politik dari Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan komunikasi politik di Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan komunikasi

politik di Partai Demokrat dalam pemilihan walikota Bandung tahun 2013.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai demokrat di Kota Bandung.
2. Pengembangan teori, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan/Politik.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran dalam melakukan penilaian, pengembangan serta solusi terhadap proses pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai demokrat di Kota Bandung di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Budaya Politik dan Partai Politik

Masyarakat sebagai suatu kesatuan politik memiliki sejumlah budaya dalam kehidupannya, terutama yang mengatur pola hidup bermasyarakat. Masyarakat dan partai politik adalah kesatuan yang utuh yang memiliki cita-cita dalam membentuk dan mencapai tujuannya. Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah dengan adanya budaya politik (*political culture*) disamping partai politik sebagai lembaga politik yang terstruktur. Pengertian budaya politik menurut Miriam Budiardjo (2000:49) dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* mengemukakan bahwa: Budaya politik adalah keseluruhan dari

pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

Budaya politik dalam suatu masyarakat merupakan sebuah pandangan masyarakat terhadap kondisi politik melalui aturan-aturan, norma-norma dan pandangan hidup lainnya. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah situasi sejarah dari perkembangan sistem politik itu sendiri. Seperti agama, adat istiadat, suku bangsa, status sosial dan lainnya yang berkembang dimasyarakat dapat mempengaruhi pandangan hidupnya terhadap perkembangan sistem politik. Pengaruh budaya politik terhadap partai politik saling berhubungan dan keterkaitannya dengan latar belakang pandangan politik partai, terutama dalam perjuangan politiknya.

Partai politik menurut pendapat Inu Kencana Syafi'i (2002:58) adalah: "... sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu *level* negara...". Partai politik merupakan sekelompok warga negara yang memiliki persamaan persepsi dan kepentingan bersama dimana tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam negara. Disisi lain, kegiatan seseorang maupun sekelompok orang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partai politik lahir dalam masyarakat secara spontan, karena adanya tuntutan keadaan pada saat itu, yang dimaksudkan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Penelitian mengenai partai politik merupakan suatu kegiatan ilmiah, walaupun bermacam-macam penelitian telah ada sejak dulu. Akan tetapi, hingga

saat ini belum tersusun suatu teori yang mantap mengenai partai sebagai lembaga politik secara khusus.

Pendapat lainnya tentang partai politik dikemukakan oleh R. H. Soltau (dalam Budiardjo, 2000:161) mengemukakan bahwa: “*A group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*”.

Partai politik yang terorganisir dengan rapi dapat mewujudkan suatu tujuannya, dimana setiap tujuan terdapat dalam suatu kesatuan politik. Umumnya partai lahir atas dasar perjanjian warga negara yang terorganisasi secara rapi. Keragaman persepsi dalam partai politik terutama dalam menyikapi persoalan politik, maka partai politik dapat memilih suatu tujuan yang dikendakinya. Suatu tujuan yang diemban partai politik biasanya tidak pernah terlepas dari suatu pengaruh kekuasaan politik untuk menguasai, melaksanakan dan mempertahankan tujuan tersebut baik dalam lingkup partai politik maupun pemerintahan.

Seperti yang dikemukakan oleh Raymond Garfield Gattel (dalam Widagdo, 1996:6) dalam buku *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, mendefinisikan partai politik sebagai berikut: “*A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out the general policies*”.

Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Serta tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Partai politik juga merupakan suatu alat kesatuan teknis rakyat dalam memperjuangkan aspirasi politiknya kepada pemerintah, melalui

penyampaian aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran partai politik sebagai penyambung aspirasi.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh J. A Corry dan Henry J. Abraham (Corry dan Abraham dalam Haryanto, 1998:9) dalam buku *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, mendefinisikan partai politik sebagai berikut: *Political party is a voluntary association among to get control of the government by filling elective offices in the government with in members.*

Partai politik pada umumnya dikendalikan oleh sekelompok manusia untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya secara konstitusional. Namun, disamping mempertahankan kekuasaannya tersebut terdapat tujuan dan cita-cita tertentu dari partai penguasa untuk membuat suatu kebijakan baik untuk partai maupun pemerintahan. Tetapi bila posisi partai tersebut sebagai oposisi, maka peran partai berlaku sebagai penyeimbang iklim perpolitikan suatu negara melalui peran kontrol politiknya.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1988:62) dalam buku *Sistem Politik Indonesia*, yang mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

Organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (*power endeavor*).

Partai politik lahir atas dasar kehendak bersama, dalam hal ini adalah rakyat yang melakukan perjanjian atas asas kesatuan tujuan dan cita-cita pada suatu kondisi tertentu. Tujuan dan cita-cita tersebut disatukan dalam suatu *platform* di bawah suatu ikatan dalam suatu ideologi

sebagai pedoman partai. Ideologi merupakan doktrin yang bersifat mengikat terhadap tujuan dan cita-cita partai. Sebagai tindak lanjut dari semua tujuan dan cita-cita itu diformulasikan dalam bentuk suatu wadah yang disebut dengan *platform* partai.

Definisi lain yang ditemukan mengenai partai politik terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan partai politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, dimana rakyat dengan bebas mendirikan partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, yang kemudian dalam deklarasi berdirinya partai diatur dalam perundang-undangan melalui akta notaris. Dalam hal ini partai yang bersangkutan didaftarkan kepada departemen kehakiman, dan untuk selanjutnya dicatat keberadaannya sebagai institusi politik yang sah. Maka, dengan adanya suatu anggapan bahwa rakyat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan, serta diikutsertakan dalam segenap proses politik dimanapun keberadaannya sebagai wujud dari rakyat yang patuh kepada negara.

Tipologi Partai Politik

Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:121) dalam buku *Memahami Ilmu Politik*, partai politik diklasifikasikan ke dalam tiga tipe. Adapun tipologi partai politik sebagai berikut:

1. Asas dan orientasi.

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu:

a. Partai politik pragmatis. Suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terkait kaku pada

suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut.

b. Partai politik doktriner. Suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Artinya, ideologi disini adalah sebagai perangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.

c. Partai politik kepentingan. Suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya partai pragmatis, biasanya cenderung pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin diutamakan. Partai ini terorganisasikan agak longgar, dan hal ini bukan berarti partai ini tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Partai pragmatis dapat dengan mudah diketahui cirinya dari segi gaya kepemimpinan dari pemimpin partai tersebut. Berbeda dengan partai doktriner dimana sejumlah *platform* yang terprogram dalam partai dijabarkan dalam ideologi. Sedangkan partai kepentingan hanya mewakili dari sebagian kepentingan kelompok tertentu saja.

2. Komposisi dan fungsi anggota.

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua tipe (Surbakti, 1992:122), yaitu:

a. Partai massa/ lindungan (*patronase*).

Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung dari berbagai kelompok ke dalam masyarakat sehingga pemilu dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.

- b. Partai kader. Suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Berdasarkan komposisinya, partai massa lebih mengutamakan jumlah anggota pendukungnya untuk merebut suara dalam pemilu dengan cara memobilisasi massa. Biasanya dalam pemilihan pemimpin partai massa, lebih dominan dengan faktor kedekatan seseorang dalam arti lindungan (*patronase*) dengan tokoh partai yang memiliki sejumlah pengaruh. Dibandingkan dengan partai kader, faktor keketatan organisasi dan disiplin partai adalah sumber kekuatan partai dalam meraih simpati masyarakat, baik dalam pemilu maupun agenda politik lainnya. Dalam hal ini PKB menurut analisis penulis dapat di golongkan ke dalam partai massa. Karena, peran simpatisan/ massa pendukung PKB dalam perolehan suara pemilu sangat diutamakan.

3. Basis sosial dan tujuan.

Gabriel Almond (dalam Surbakti, 1992:123-124) menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosial, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- b. Partai yang beranggotakan berasal

dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan pengusaha.

- c. Partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha.
- d. Partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Partai perwakilan kelompok. Artinya, partai politik yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- b. Partai pembinaan bangsa. Artinya, partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional, dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- c. Partai mobilisasi. Artinya, partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Maka berdasarkan basis sosial dan tujuannya partai politik digolongkan berdasarkan pada tingkatan strata sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri, dan keduanya dihubungkan dengan tujuan/ kepentingan dari kelompok masyarakat dalam peran serta berpartisipasi politik. Disamping itu, faktor lain juga berpengaruh terhadap partai politik yang berbasis pada massa. Seperti sensitifitas partai dengan suatu aliran politik seperti pada basis kepentingan kelompok baik agama, suku bangsa, budaya dan lainnya. Sehingga peranan kelompok demikian itu memberikan dorongan baik secara moral maupun spiritual untuk perolehan suara dalam pemilu.

Komunikasi Politik

Perkembangan komunikasi politik akan selalu mengikuti dan berimpit dengan kemajuan masyarakat semakin masyarakat maju berkembang, semakin kompleks pula problema yang dihadapi komunikasi. Kecepatan arus informasi atau komunikasi, tukar menukar fakta dan data visualisasi kemajaan suatu negara akan merupakan stimulasi bagi setiap negara untuk meningkatkan taraf kemajuannya. Untuk memberikan cakrawala pandangan tentang komunikasi politik secara totalitas, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang komunikasi dan politik serta fungsi komunikasi politik itu sendiri.

Bride memperinci fungsi komunikasi, yaitu : Fungsi Informasi, Fungsi sosialisasi, Fungsi motivasi, Fungsi debat dan diskusi, Fungsi Pendidikan, Memajukan kebudayaan, Hiburan dan Integrasi. Fungsi politik lebih cenderung kepada fungsi politik yang ada pada suprastruktur yang telah digariskan berdasarkan konsitusi yang berlaku dan sesuai dengan garis strategi pemerintah didalam upaya mensejahterakan seluruh masyarakat. Demikian pula fungsi komunikasi politik dimana kita lihat terhadap upaya manusia, karena baik komunikasi atau politik keduanya merupakan usaha manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak dapat dipahami kecuali apa bila dihubungkan dengan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya. Komunikasi dipandang dalam arti yang lebih luas meliputi seluruh pertukaran pesan diantara individu-individu warga masyarakat dari mulai kompleks yang terkecil (keluarga) sampai pada kelompok yang lebih luas yang disebut masyarakat negara.

Pengertian Menurut Sumarno A.P komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan

komunikasi ini dapat meningkat semua warganya melalui suatu aksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Selain itu, Rusadi Kartaprawira berpendapat bahwa komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, sosial atau maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.

Akibat Komunikasi Politik

Setelah menunjukkan preferensi untuk memikirkan tiga komponen opini yang saling lingkup, yakni kepercayaan, nilai, dan pengharapan, dan setelah menguraikan teori kebergantungan dari Ball-Rokeach dan Defleur yang cocok dengan pandangan itu, maka tepat bagi kita untuk merangkumkan akibat potensial dari komunikasi dengan menggunakan kategori kognitif, apektif, dan behavioural yang digunakan dalam model kebergantungan.

1. Akibat kognitif

Situasi itu ambigu atau tidak, komunikasi membantu orang menetapkannya. Seperti argumentasi Ball-Rokeach dan Defleur, media tidak menetapkan bahwa setiap orang menginterpretasikan peristiwa dengan seragam; namun, dengan mengontrol informasi apa yang disampaikan dan tidak disampaikan, dan bagaimana informasi itu disajikan, media dapat memainkan peran besar dalam membatasi keanekaragaman interpretasi yang dapat dibuat oleh khalayak.

Dengan menanggapi komunikasi, orang memperluas realitas politik yang dipersepsinya serta menginterpretasikan situasi yang ambigu dan rutin. Sistem politik seseorang bisa jadi kaya, bermacam-macam, dan mencakup masalah yang hampir tak terhitung, sementara yang lain berfokus sempit dan miskin rincian. Ia akan terbuka terhadap komunikasi oleh orang yang bergantung pada media dalam menyajikan informasi baginya untuk

memperbesar sistem kepercayaan dan mencakup obyek politik yang lebih bervariasi (misalnya, menggabungkan isu dan kebijakan maupun personalia dan partai politik).

2. Akibat apektif

Ada konsensus umum bahwa komunikasi politik lebih cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang dalam nilai politik mereka. Semakin jelas, misalnya bahwa media massa mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang tentang politik, sebagian karena akibat kognitif dari media dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak dan yang didorong oleh hubungan kebergantungan.

Empat konsekuensi apektif yang potensial keluar dari komunikasi politik:

- a. Seseorang bisa menjernihkan, atau mengkristalkan, nilai politik melalui komunikasi politik.
- b. Orang bisa memperkuat nilai melalui komunikasi politik. Riset menunjukkan bahwa hal ini barangkali merupakan konsekuensi apektif dari komunikasi karena orang secara selektif memperhatikan pesan yang cocok dengan pandangannya, mempersepsi isi pesan sebagai sesuatu yang tidak mengancam, dan mengingat pesan yang mengukuhkan penilaian sebelumnya tentang objek politik.
- c. Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.
- d. Apakah imbauan politik memindahkan orang dari persuasi yang satu ke persuasi yang lain.

3. Akibat Partisipasi

Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik; di pihak lain, komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik.

Apakah aktivasi dan deaktivasi, konsekuensi komunikasi politik bisa primer atau sekunder. Akibat primer terjadi jika orang yang dipengaruhi itu telah melibatkan diri

secara langsung ke dalam proses komunikasi. Konsekuensi sekunder dari komunikasi terjadi jika orang yang tidak terlibat secara langsung dalam komunikasi terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang dikaji pada penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Bungin (2001:124) dapat diartikan sebagai berikut:

Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.

Metode deskriptif ini ditujukan untuk menganalisa masalah-masalah yang mendeskripsikannya menurut Surakhmad (1998: 139) dalam bentuk tuangan tulisan yaitu "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya".

Peneliti juga memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif karena peneliti dalam melakukan penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono (2005:1) yaitu metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

Menurut Sugiyono (2007: 62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, undang-undang dan lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi komunikasi partai demokrat di Kota Bandung. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi yang diharapkan.
2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai demokrat Kota Bandung yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan ini terdiri dari:
 - a. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung

permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai demokrat Kota Bandung. Menurut Bungin (2007: 155) wawancara adalah “proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data yang terkait dengan pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai demokrat Kota Bandung.
- d. Menurut Mukhtar (2007: 89) bahwa “teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Dokumentasi dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak dibutuhkan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Komunikasi Politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung

Komunikasi merupakan suatu [proses](#) penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi

dilakukan dengan menggunakan kata-kata ([lisan](#)) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada [bahasa](#) verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat.

Perkembangan komunikasi politik akan selalu mengikuti dan berimpit dengan kemajuan masyarakat semakin masyarakat maju berkembang, semakin kompleks pula problema yang dihadapi komunikasi. Kecepatan arus informasi atau komunikasi, tukar menukar fakta dan data visualisasi kemajuan suatu negara akan merupakan stimulasi bagi setiap negara untuk meningkatkan taraf kemajuannya. Untuk memberikan cakrawala pandangan tentang komunikasi politik secara totalitas, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang komunikasi dan politik serta fungsi komunikasi politik itu sendiri.

Pelaksanaan komunikasi politik diperoleh berdasarkan komunikator, pesan yang disampaikan, saluran yang dipakai dalam komunikasi politik, umpan balik dari pesan yang disampaikan dan audiens. Berikut akan dijelaskan masing-masing dari dimensi komunikasi politik pada Partai Demokrat.

Sumber Komunikasi Politik atau Komunikator dalam Komunikasi Politik Partai Demokrat

Komunikasi politik dapat menyelenggarakan proses komunikasi dengan penetapan sumber komunikasi politik/ komunikasikan. Komunikasi politik di Partai Demokrat berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan pimpinan partai yaitu berupa pesan politik yang harus disampaikan kepada para anggota, misalnya: sosialisasi peraturan, tata tertib partai, ideologi partai, perintah atasan yang berasal dari DPP (selaku pihak yang

memprakarsai komunikasi politik) kepada DPD, DPC ataupun PAC sebagai bawahannya.

Pemimpin partai merupakan salah satu intisari, sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam perkembangan partai politik yang dipimpinya. Kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan partai dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan kreatif maka partai politik yang dipimpinya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin banyak yang akhirnya akan menjadikan partai yang sukses.

Seorang pemimpin yang kurang kreatif dan tidak dinamis maka partai politik yang dipimpinya pun akan melemah. Kegiatan dan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai sebagian besar ditentukan oleh cara ketua partai memimpin partai. Efektivitas para pengurus dan anggota sebagian besar ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin.

Setiap pimpinan partai menghendaki dalam tubuh partai politik yang dipimpinya senantiasa tercipta harmoni dan kondusifitas yang tinggi. Suasana yang harmonis dan kondusif menciptakan sebuah energi yang berharga didalam pengelolaan partai politik disaat kompetisi antara parpol sangat ketat dalam proses pemilu. Tidak ada pimpinan partai yang menginginkan, partai yang dipimpinya selalu berada dalam keadaan instabilitas, atau selalu berada dalam suasana kegoncangan atau konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil observasi, kepemimpinan ketua DPC Partai Demokrat di Kota Bandung berjalan dengan baik. Beliau memberikan arahan kepada bawahannya dengan kecapakan yang baik sehingga mudah dimengerti oleh pengurus dan anggota partai. Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kota Bandung bersikap obyektif dalam menghadapi fenomena

konflik internal partai yang dapat mengakibatkan keterpurukan partai. Pemimpin partai yang efektif mengelola konflik adalah yang punya integritas dan kemampuan komunikasi politik yang baik, sehingga dapat diterima keberadaan dan fungsinya sebagai mediator dengan baik karena adanya kepercayaan kepada ketua DPC Partai.

Pelaksanaan komunikasi partai demokrat dilakukan melalui proses pencitraan pembina partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Partai demokrat lemah dalam kaderisasi partai sehingga komunikasi politik langsung melalui media kepada masyarakat. Jika salah satu lemah maka jaringan yang lain harus kuat. Pencitraan yang baik dari pemimpin partai dapat meningkatkan perolehan suara. Pencitraan yang baik dilakukan setelah berkonsultasi dengan konsultan media, konsultan pencitraan dan konsultan komunikasi.

Konsep pencitraan dicetuskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Pencitraan tersebut adalah pemimpin yang demokratis, berwibawa dan bersahaja. Karakter Susilo Bambang Yudhoyono sangat mudah untuk dijual dalam arti karakter Susilo Bambang Yudhoyono sangat diidolakan. Figur tokoh di tingkat lokal yang ditrakan baik adalah ketua DPC di tingkat daerah. Belum tentu figur-figur yang ada di tingkat lokal yang diidolakan adalah kepala daerah. Pencitraan yang baik dari pemimpin partai membuat pesan dapat mudah diterima oleh pengurus dan anggota partai bahkan oleh masyarakat umum.

Pemimpin partai melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi politik mereka dengan mengkomunikasikan tuntutan dan rekomendasi untuk menjadi kebijakan pemerintah. Pemimpin partai mendasarkan diri kepada informasi yang diberikan kepada pengurus dan anggota partai dan di komunikasikan di antara mereka sendiri dan dengan unsur-unsur lain dalam sistem politik. Ketua DPC Partai Demokrat memperoleh dan menganalisis informasi dari masyarakat dan dari berbagai

bagian pemerintah.

Perolehan pesan politik yang baik dari ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan partai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan anggota DPC Partai Demokrat Kota Bandung diketahui bahwa kepemimpinan ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung mampu menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan bawahannya. Hal tersebut dikarenakan mampu mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan partai sehingga tujuan partai dapat tercapai yaitu memenangkan pemilihan umum terutama di Kota Bandung.

Bentuk kepemimpinan khas yang dikehendaki ada pada kaum muda partai adalah: kepemimpinan tersebut mempunyai kemampuan-kemampuan dapat memberikan dan mengembangkan motivasi-motivasi untuk berkarya dan membangun. Jadi mampu menstimulir segenap lapisan rakyat maupun kaum mudanya untuk melakukan kekerjaan, yaitu kerja kreatif. Selain itu, pemimpin mampu menggerakkan orang lain, sehingga mereka mau dan rela secara bersama-sama mencapai satu tujuan, dengan berkarya secara kooperatif dan kolektif.

Seorang pemimpin harus sanggup mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, sehingga mereka menyadari akan urgensinya. Bersedia menerima usaha-usaha sebagai milik bersama, kewajiban bersama, dan tanggung jawab etis bersama, yang dilaksanakan secara kolektif bersama-sama. Tulus dan ikhlas melaksanakan usaha melalui perbuatan konkrit dan keteladanan/keutamaan.

Jelaslah, bahwa keterampilan kepemimpinan tersebut sangat diperlukan untuk menggerakkan segenap anggota dan pengurus partai, agar mereka terarah merealisasikan secara nyata segenap potensi dan kemampuannya guna berperan serta dalam organisasi partai. Dalam hal ini

motivasi oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung sangat penting dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan pengarahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program partai, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, dan urusan lainnya.

Pengarahan pimpinan yang dilakukan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung dalam pelaksanaan komunikasi politik terbagi ke dalam dua bagian yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengarahan pimpinan secara langsung yaitu oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung melakukan melalui rapat mingguan untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan mencari solusi dari masalah partai selama satu minggu. Secara tidak langsung yang melalui sikap keteladanan pribadi yang dilaksanakan oleh pimpinan dengan bersikap jujur, kredibel dan loyal terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dan menjadi panutan terhadap bawahannya dengan melaksanakan kepemimpinan secara demokratis.

Selain melalui pimpinan DPC Partai, sumber komunikasi politik partai juga diperoleh melalui pengurus DPC Partai. Keberhasilan pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat adalah adanya kinerja dari pengurus partai. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengurus Partai Demokrat Kota Bandung sudah memiliki visi dan misi bersama dalam menjadikan Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu. Walaupun pada kenyataannya masih banyak pengurus partai yang memiliki persepsi masing-masing dalam melaksanakan komunikasi politik. Hal tersebut mengakibatkan kurang intensif dan

efektifnya kerja partai. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti. Partai politik kurang memiliki program yang jelas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, belum dapat membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Kepemimpinan partai yang kurang responsif dan inovatif sehingga menimbulkan sejumlah problematik dan konflik yang sering tidak terselesaikan oleh internal partai. Konflik yang tidak terselesaikan tersebut disebabkan oleh terbatasnya pengaturan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat internal partai, maupun penyelesaian konflik/perselisihan yang dilakukan melalui pengadilan. Tambahan lagi, tidak adanya kesadaran para pengurus untuk segera menyelesaikan konflik dan masing-masing mau menangnya sendiri akan mengakibatkan semakin berlarut-larutnya konflik. Masalah yang terjadi di atas dapat mengakibatkan melemahnya soliditas partai, mandegnya mesin politik partai, turunnya apresiasi masyarakat terhadap partai, jatuhnya wibawa dan citra partai, dan melemahnya kekuatan (daya tawar) politik partai.

Sebagai sumber komunikasi atau komunikator dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung adalah semua pimpinan serta pengurus partai baik dari tingkat DPP sebagai tingkat yang lebih atas, pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bandung, dan pengurus tingkat PAC. Namun pada dasarnya semua anggota partai bisa berperan menjadi komunikator di mana pada saat dia menginformasikan sesuatu mengenai politik pada orang lain.

Untuk mengorganisasi para warga negara yang menjadi anggotanya untuk mencapai cita-cita perjuangan partai, diperlukan sejumlah pengurus di berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari ranting (desa/kelurahan), anak cabang

(kecamatan), dan cabang sampai pada tingkat pusat. Posisi/jabatan pengurus yang tersedia terbatas sedangkan para anggota yang ingin menduduki jabatan itu sangat banyak, maka terjadilah persaingan dalam arena itu. Dalam mengisi jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik mempersiapkan para calon untuk ikut bersaing dalam pemilihan umum. Karena jumlah posisi yang diperebutkan sedikit, sedangkan kader partai yang ingin menjadi calon sangat banyak, maka terjadi pula konflik dalam partai. Kedua hal ini dan berbagai isu yang harus diputuskan oleh suatu partai menyebabkan konflik tidak dapat dihindarkan.

Pesan yang Disampaikan Komunikator dalam Komunikasi Politik Partai Demokrat

Pelaksanaan komunikasi politik tidak lepas dari adanya pesan yang ingin disampaikan oleh partai politik. Pesan yang disampaikan adalah perintah yang diberikan oleh pimpinan partai, larangan dan program kerja partai yang harus disampaikan kepada anggotanya. Melalui pesan yang diberikan tersebut diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai Partai Demokrat Kota Bandung.

Pesan yang hendak disampaikan yang pertama adalah perintah yang diberikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung kepada anggota dan pengurus partai. Salah satu perintah yang diberikan dalam melaksanakan komunikasi politik adalah pesan yang ingin disampaikan partai demokrat dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat adalah harus santun. Setiap anggota partai pada anak cabang dimanapun harus memberikan sikap santun kepada masyarakat. Selain itu melalui komunikasi yang baik dapat memperlihatkan proses demokrasi yang baik tanpa harus saling bertikai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengenai perintah yang diberikan ketua DPC partai adalah selalu berupaya memberikan kejelasan

informasi mengenai Partai Demokrat dengan baik dan benar. Tetapi banyak masyarakat yang kurang akan pesan yang diberikan oleh DPC Partai Demokrat Kota Bandung, terutama untuk masyarakat yang ada di daerah terpencil. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat di daerah terpencil sangat kurang.

Penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kota Bandung ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Bandung melalui perintah yang diberikan ketua DPC partai cukup dimengerti oleh pengurus dan anggota partai serta sebagian masyarakat, Pihak pelaksana DPC Partai Demokrat Kota Bandung memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan dari Partai Demokrat. Tujuan penyampaian pesan melalui pelaksanaan komunikasi yaitu untuk meningkatkan perolehan suara partai di daerah, karena membutuhkan cara kerja yang cepat atau tidak berbelit-belit, tepat terhadap sasaran yang akan dicapai dan akurat.

Untuk perintah larangan yang disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung merupakan penyampaian larangan bagi pengurus dan anggota partai dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, terlihat kertetiban umum kader Partai Demokrat DPC Kota Bandung sebagian besar sudah terpelihara dengan cukup baik. Dari kehidupan sosial tergolong rukun dan jarang sekali terjadi perselisihan baik antara kader Partai Demokrat dengan pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung maupun di dalam kader Partai Demokrat DPC Kota Bandung itu sendiri. Namun masalah penyakit kader Partai Demokrat khususnya masalah pendidikan politik, masih sangat sulit untuk diberantas atau minimal sekedar ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kecil yang menjadikan kota sebagai tempat mangkal para kader DPC Partai Demokrat Kota

Bandung. Untuk itu diperlukan adanya perintah larangan dari pimpinan partai.

Berdasarkan hasil wawancara, perintah larangan bagi kader Partai Demokrat DPC Kota Bandung saat ini terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jarang adanya tindakan protes, demo maupun tindakan penentangan lainnya terhadap pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Sehingga perintah larangan tersebut telah berjalan dengan baik. Walaupun masih tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai. Berhubungan dengan praktik komunikasi politik, memang masih saja ada orang-orang yang mengganggu ketertiban umum dengan memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat transaksi praktik pelanggaran penyampaian pesan.

Selain itu, pesan yang disampaikan oleh Partai Demokrat adalah mengenai program-program yang hendak dicapai pada saat pemilihan umum yang disampaikan kepada masyarakat. Program yang disampaikan oleh Partai Demokrat adalah program yang tidak menjanjikan atau tidak boleh memberikan janji kepada masyarakat diluar pesan yang ingin disampaikan. Program-program Partai Demokrat adalah kenyataan yang menjadi permasalahan di masyarakat sehingga tidak perlu memberikan janji belaka karena telah dilaksanakan dengan baik.

Partai Demokrat dalam kampanye politiknya memaparkan sejumlah program pro rakyat yang telah dirintis oleh SBY selaku Presiden terpilih sebelumnya selama lima tahun terakhir. Program itu antara lain bantuan untuk petani, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), bantuan infrastruktur, kesehatan, kebijakan ekonomi dan lainnya. Program BLT merupakan upaya riil meningkatkan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan. Sama sekali bukan penghamburan anggaran, karena diterima oleh rakyat.

Sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan penataran kepemimpinan untuk

setiap anggota partai untuk menyamakan visi dan misi yang akan dilaksanakan sehingga menghasilkan satu suara. Kajian balitbang menghasilkan sebuah konsep atau pesan yang berangkat dari kajian yang sudah matang yang mengikuti kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat. Beberapa program yang mengikuti kebutuhan masyarakat diantaranya adalah program BLT, PNPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, sasaran yang ditentukan biasanya adalah para masyarakat yang akan target aktivitas dalam penyampaian pesan partai politik sehingga memilih Partai Demokrat. Belum tepatnya sasaran disebabkan karena sering lolosnya orang-orang dari partisipasi politik yang dilakukan. Bahkan ada yang menyangka bahwa para pelaku pendidikan politik yang menjadi sasaran utama dari pelaksanaan aktivitas pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung itu ada yang melindungi. Orang yang melindungi mereka ini disinyalir masih dari pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung yang merupakan oknum penghambat keberhasilan pelaksanaan komunikasi politik Partai Demokrat.

Pesan yang ingin disampaikan partai politik adalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pesan yang disampaikan dengan baik dapat membuat masyarakat berkenan untuk memilih partai. Hal inilah yang dilakukan oleh partai demokrat terutama di Kota Bandung. Partai dalam memberikan pesan politik dicari terlebih dahulu isu apa yang berkembang dimasyarakat. Sehingga dicari tahu solusi yang dibuat untuk mengatasi segala permasalahan.

Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat pada pemilihan umum, partai politik menawarkan tidak saja calon-calon yang dinilai ahli untuk jabatan publik di legislatif dan eksekutif tetapi juga alternatif kebijakan (program) untuk merespon aspirasi dan tuntutan berbagai kelompok masyarakat.

Walaupun proses penyampaian pesan yang

dilakukan oleh DPC Partai Demokrat sudah berjalan dengan baik, sebagian masyarakat tidak mengetahui pesan apa yang diberikan oleh partai demokrat. Sebagian masyarakat memilih partai demokrat hanya karena figur Susilo Bambang Yudoyono tanpa tahu program yang hendak dicapai.

Saluran yang Dipakai dalam Komunikasi Politik Partai Demokrat

Kekuatan media massa (*powerful media*) sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, telah banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan melipatgandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Maka dari itu, bagi para elit politik yang ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Media dalam bentuk apapun adalah saluran komunikasi seorang kandidat kepada khalayak yang dikatakan efektif dan efisien pada masa kampanye modern saat ini.

Komunikasi politik di tingkat DPC Partai Demokrat Kota Bandung merupakan bagian dari komunikasi politik yang terjadi di Partai Demokrat, yaitu suatu proses penyampaian pesan dari pimpinan tingkat DPC kepada PAC atau anggota sebagai bawahan melalui proses kampanye. Pelaksanaan kampanye tersebut dilakukan dengan lisan ataupun tulisan dengan menggunakan media, baik elektronik maupun cetak untuk mencapai suatu tujuan partai yang telah ditentukan bersama. Sebagian besar proses komunikasi partai demokrat media elektronik maupun cetak dengan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mencapai tujuan partai yang telah ditentukan bersama.

Pada umumnya setiap tingkat DPC dalam komunikasi politik melakukan hal yang sama. Proses komunikasi merupakan suatu sistem, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan

terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu partai politik. Sekalipun keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur-unsur tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan.

Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik. Hal ini dilakukan pula oleh DPC Partai Demokrat Kota Bandung agar miskomunikasi dapat dihindari seminimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyampaian pesan atau kampanye secara lisan yang dilakukan pada tempat yang luas dan dihadiri oleh anggota partai dilaksanakan kurang baik. Masyarakat tidak terlalu antusias untuk mengikuti kampanye terbuka di lapangan luas.

Sebagai suatu sistem, komunikasi politik dapat berjalan dengan baik jika semua unsur-unsur di dalamnya saling mendukung. Komunikasi politik merupakan suatu kegiatan, proses dalam penyampaian pesan politik. Salah satu kegiatan komunikasi politik adalah kampanye pemilu salah satunya kampanye pemilu tahun 2004, dalam menarik simpati massa Partai Demokrat melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemberian pengobatan, khitanan masal, pengajian rutin, dan menghubungi atau silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kecamatan setempat.

Kegiatan ini diupayakan agar hubungan antara pemimpin partai dengan masyarakat lebih dekat lagi. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat merupakan orang yang cukup berpengaruh dalam masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa membawa Partai Demokrat untuk memperoleh suara yang banyak dalam pemilu, walaupun upaya itu tidak memberikan kontribusi yang banyak dalam perolehan suara.

Namun hal itu tidak menyebabkan Partai Demokrat menjadi lemah, Partai

Demokrat makin meningkatkan lagi efektifitas komunikasi politik dengan anggotanya. Karena Partai Demokrat beranggapan bahwa perbaikan harus dilaksanakan di dalam partai terlebih dahulu, terutama anggota partai sebagai salah satu unsur yang sangat penting yaitu sebagai komunikator dalam sistem komunikasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengadakan pendidikan politik. Pendidikan politik ini dilakukan juga ditingkat DPC Kabupaten/ Kota lain.

Pesan politik di DPC Partai Demokrat disampaikan melalui media lisan (rapat-rapat anggota partai), ataupun media elektronik (telepon, ponsel), media tulisan dan sebagainya. Anggota partai sebagai audiens/pendengar atau komunikator mereka harus tanggap terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi miskomunikasi karena dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik, anggota partai berperan sebagai pelaksana.

Komunikasi politik internal di DPC Partai Demokrat Kota Bandung dilaksanakan melalui proses komunikasi secara primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer dilakukan dengan menggunakan lambang (Simbol) sebagai media yaitu: bahasa, gambar (berupa reklame, iklan), warna (warna merah sebagai lambang warna Partai Demokrat), dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaan komunikasi dari media tersebut yang banyak digunakan adalah bahasa baik berbentuk ide, informasi atau opini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber proses komunikasi secara primer yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat melalui tatap muka langsung seperti misalnya dalam penyampaian program kerja dari partai, rapat anggota tingkat cabang yang dilaksanakan satu atau dua minggu sekali yang membahas masalah kaderisasi internal, masalah-masalah yang sedang

berkembang dan terjadi di masyarakat, anggota DPC Partai Demokrat Kota Bandung ikut berpartisipasi untuk kota Bandung berupa pangan dan materi. Untuk secara hierarki struktural saluran komunikasi politik DPC Partai Demokrat Kota Bandung melalui surat instansi yang dibuat oleh divisi setingkat di atas cabang yang bersangkutan misalnya dari DPP kepada tingkat DPD dan dari DPD kepada DPC, seterusnya. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang dan bahasa sebagai media pertama. Hal ini disebabkan oleh bahasa sebagai lambang (simbol) beserta *isi (content)* yakni pikiran dan/ atau perasaan yang dibawanya menjadi totalitas pesan (*message*), yang tampak dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu media sekunder dibutuhkan untuk mencapai totalitas penyampaian pesan tersebut.

Selain proses komunikasi dilakukan secara primer dan sekunder, DPC Partai Demokrat Kota Bandung melaksanakan proses komunikasi secara formal dan informal. Secara formal dilakukan melalui rapat-rapat resmi seperti rapat anggota tingkat cabang yang dilakukan satu atau dua minggu sekali, rapat koordinasi wilayah yang dilakukan 1 tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi, komunikasi yang dilakukan di DPC Partai Demokrat Kota Bandung dilaksanakan melalui komunikasi personal dimana dilakukan dialog dengan anggota, dalam rapat kerja baik pusat maupun daerah, seminar eksternal dan internal. Melalui rapat kerja tersebut diharapkan dapat menyatukan visi dan misi parpol untuk dapat memenangkan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.

Pelaksanaan komunikasi politik dilakukan oleh Partai Demokrat adalah melalui sistem komunikasi yang dapat mengakses ke masyarakat yaitu menggunakan jaringan media yang langsung masuk ke rumah-rumah sehingga

dapat langsung diterima masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung. Seperti pada kampanye pertama pemilu presiden tahun 2004 dimana megawati memanfaatkan partai kader yang banyak, Partai Demokrat melakukan kampanye pertamanya Susilo Bambang Yudoyono tampil melalui media sehingga rakyat dapat lebih respon.

Cara kampanye melalui media ini dapat mengalahkan cara kampanye langsung di lapangan yang hanya dapat menyedot pengikut kurang lebih 10.000 orang sedangkan melalui media dapat menjangkau pelosok negeri. DPP (dewan pimpinan pusat) yang memutuskan media mana yang dipilih untuk tingkat lokal yang dapat memilih media mana yang akan dipilih.

Partai Demokrat ingin meninggalkan komunikasi kontemporer sehingga lebih efektif dengan biaya yang lebih efektif pula. Pelaksanaan kampanye melalui kaderisasi dengan bertemu kader-kader partai di ruang terbuka hanya akan menambah dana yang tidak sedikit dan belum tentu efektif dalam memberikan suara pada saat pemilihan.

Media massa adalah faktor penting dalam mengkonstruksi publik. Figur politik mempengaruhi media dan media mempengaruhi representasi pemerintahan. Hal itu bisa dilihat dari popularitas Susilo Bambang Yudoyono tak bisa dihindari karena keterlibatan media dalam mengemas citra sehingga menjadi seperti sekarang ini.

Media menempati peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik terhadap khalayak. Media tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk sekedar memperkenalkan agenda-agendanya bahkan bisa merubah pilihan sebelumnya tentu dengan strategi yang dimiliki media secara terus-menerus mempengaruhi khalayak. Berbagai media yang digunakan, tentu ada kelebihan dan kelemahannya, begitu juga mengandung pengaruh positif dan negatif terhadap khalayak. Upaya penyaringan dan control

terhadap segala berita yang dimuat di media perlu dilakukan agar tidak salah pilih. Komunikator maupun aktivis politik mudah menghipnotis khalayak dengan citra yang ditampilkan setiap saat melalui media. Berbagai isu dikemas dengan apik untuk mendapatkan tempat di ruang publik sehingga khalayak yang dijadikan sasaran oleh mereka bisa mengenal dan setelah itu memilihnya.

Umpan Balik dari Komunikasi yang Diberikan dalam Komunikasi Politik Partai Demokrat

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi di DPC Partai Demokrat diperlukan satu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. *Feed back* yang ditimbulkan dari adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat berupa penerimaan yang positif dari anggota. Namun penerimaan tersebut tidak lepas dari upaya komunikator sebagai penyampai pesan dalam menyampaikan pesan politik tersebut. Dengan terjadinya miskomunikasi di DPC Partai Demokrat Kota Bandung, pesan politik yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Sehingga umpan balik yang diterima kadang negatif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, umpan balik dari proses komunikasi politik yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengalami penerimaan dari masyarakat sebagai pendengar. Penerimaan yang baik akan menciptakan partisipasi yang baik pula dari masyarakat.

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta - secara langsung atau tak langsung - dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk

dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, termasuk menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi sernua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional.

Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para pengurus dan aktivis partai berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Karena itu ideologi suatu partai ataupun ideologi yang dianut politisi dapat dilihat pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya. Berbagai pernyataan politik yang dikemukakan untuk dilaksanakan menanggapi persoalan yang dihadapi negara-bangsa, pada respon yang diberikan terhadap aspirasi yang diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, pada pola dan arah peraturan perundang-undangan yang diperjuangkannya, dan pada sosok orang-orang yang diusulkan atau dipilihnya untuk menduduki berbagai jabatan kenegaraan di pusat dan daerah. Memperjuangkan cita-cita partai dan aspirasi rakyat yang diagregasikan berdasarkan cita-cita partai itu, partai politik mencari dan mempertahankan kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum dan cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memerlukan dukungan partai politik melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik pada satu pihak dan menggalang

dukungan politik (suara) dan materil (dana dan sarana) dari anggota dan simpatisan.

Keberhasilan dari komunikasi Partai Demokrat Kota Bandung dapat dilihat dari umpan balik dari masyarakat dengan memilih Partai Demokrat dan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat. Partai Demokrat mendapat perolehan suara tertinggi di beberapa daerah pilihan di Kota Bandung. Berikut perolehan suara Partai Demokrat Kota Bandung hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2013:

Tabel 1
Daftar Rekapitulasi Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bandung
Perdapil Se-Kota Bandung

Wilayah	Dapil	Pasangan Calon
		No.1
Kota Bandung	Dapil 1	15.157
	Dapil 2	17.276
	Dapil 3	20.009
	Dapil 4	33.731
	Dapil 5	15.440
	Dapil 6	44.720
Jumlah Seluruhnya		146.333

Berdasarkan data Tabel 1, jumlah perolehan suara dari DPC Partai Demokrat Kota Bandung pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung sebanyak 146.333. dengan suara terbanyak diperoleh oleh pasangan calon no 4 sebanyak 351.451 suara. perolehan suara Partai Demokrat di Kota Bandung adalah yang paling banyak mendapatkan perolehan suara yaitu sebesar 44.720 suara dengan perolehan suara terbanyak di daerah Dapil 6.

Banyaknya suara yang diperoleh DPC Partai Demokrat di Kota Bandung karena pelaksanaan komunikasi yang baik dari anggota dan pengurus partai. Partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sebagai timbal balik diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat yang

memilih Partai Demokrat berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan disampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandung.

Audiens/Pendengar dalam Komunikasi Politik Partai Demokrat

Pihak yang menjadi tujuan disampaikan suatu pesan disebut sebagai penerima (*receiver*), atau khalayak (*audience*), atau komunikan. Khalayak pada giliran berikutnya penerima pesan akan memprakarsai penyampaian suatu pesan berikutnya, maka pada saat itu sebenarnya pihak yang tadinya disebut sebagai khalayak itu telah berubah peran menjadi komunikator. Sasaran pendengar dalam komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat adalah masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai demokrat. Pesan komunikasi politik partai demokrat Kota Bandung diberikan kepada anggota partai dan masyarakat umum.

Partai politik berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen. Hal ini yang membuat partai gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara, hal ini dapat menimbulkan frustrasi bagi kader dan pengurus partai. Kondisi ini akan berakibat kader dan pengurus partai yang berdedikasi tinggi sekaligus memiliki karakter, dengan mudah mengubah garis politik.

Berdasarkan hasil observasi banyak masyarakat yang masuk menjadi anggota partai demokrat dikarenakan proses komunikasi yang cukup baik dari partai demokrat terutama di Kota Bandung. Anggota Partai Demokrat di Kota Bandung

merupakan kader partai terbanyak. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta – secara langsung atau tak langsung – dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, termasuk menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Jumlah para pelaku praktik partisipasi politik setelah diadakan aktivitas pendidikan politik memang bertambah, namun tidak dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang yang tertangkap partisipasi politik dan terbukti sebagai pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Orang-orang tersebut diberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan untuk dapat berusaha sendiri dalam mencari nafkah. Namun bagi sebagian orang, mereka banyak yang kembali berprofesi sebagai pengusaha.

Komunikasi yang baik memberikan penguatan dukungan kepada Partai Demokrat dari kader-kader partai. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan kader Partai Demokrat untuk komunikasi politik Partai Demokrat sangat positif. Terkadang saking antusiasnya kader partai untuk ikut dalam komunikasi politik Partai Demokrat ini, mereka melakukan tindakan sendiri dengan dibantu para remaja dan pihak lain. Namun belakangan hal ini berkurang jika tidak diketahui dan dibarengi oleh pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Bandung khususnya Pimpinan Partai Demokrat DPC Kota Bandung, karena dikhawatirkan akan timbul keributan, bentrokan fisik bahkan tindakan anarkisme.

Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Komunikasi Politik di DPC Partai Demokrat

Kota Bandung

Partai Demokrat sebagai partai politik besar, mempunyai massa yang relatif banyak sebagai pendukungnya. Massa yang cukup banyak dikarenakan hubungan yang baik antara komunikator dengan komunikan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terjalin hubungan yang baik antara komunikator partai demokrat dengan komunikan. Proses komunikasi yang baik dari komunikator Partai Demokrat membuat masyarakat sebagai audience atau pendengar merasa tertarik sehingga akhirnya memilih partai demokrat.

Salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung adalah saluran penyediaan media internet sebagai saluran komunikasi internal Partai Demokrat juga sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan kualitas anggota parpol. Walaupun Partai Demokrat lemah dalam kaderisasi tetapi kader parpol harus berkualitas karena kader partai politik merupakan pendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu para pemimpin dan pengurus DPC Partai Demokrat kota Bandung. Kader berfungsi sebagai gigi penggerak motor organisasi dan tulang punggung partai. Kader partai bertugas sebagai jembatan di dalam partai dan mereka harus menjadi kuat dari yang tadinya lemah. Untuk memperoleh kader partai politik yang handal diadakan beberapa persyaratan. Adapun syarat menjadi seorang kader sebagai berikut:

1. Disiplin: ideologis, administratif
2. Loyalitas kesetiaan
3. keberanian dan moralitas
4. Kemandirian dan prakarsa kreatif
5. Pengorbanan dan keteladanan

Dengan proses kaderisasi dan persyaratan seperti yang telah ditulis diatas Partai Demokrat berharap dapat membantu mensosialisasikan program-program partai. Partai Demokrat lebih selektif lagi dalam memilih anggota. Hal ini diupayakan agar tidak terjadi miss komunikasi di tingkat bawah yaitu PAC yang tingkat pendidikan

anggota-anggotanya masih rendah. Untuk itu kualitas anggota parpol harus ditingkatkan.

Dengan pendukung massa yang relatif banyak Partai Demokrat termasuk 5 besar parpol yang ada di Indonesia. Ini berpengaruh terhadap DPC Partai Demokrat Kota Bandung sebagai wakil di tingkat kabupaten/ Kota dalam melakukan proses komunikasi. Proses komunikasi menjadi sangat kompleks dengan komunikan dari berbagai kalangan, status sosial, pendidikan dan latar belakang kebudayaan yang berbeda pula.

Sebagai partai politik yang termasuk 5 besar yang ada di Indonesia, Partai Demokrat merupakan partai kuat dan modern dengan ciri-ciri:

1. Mempunyai ideologi yang kuat
2. Mempunyai visi dan misi
3. Bekerja berdasarkan aspirasi rakyat
4. Pemimpin dan kader yang terpercaya
5. anggota partai yang handal dan bermutu
6. Mempunyai *platform* politik yang sesuai dengan kebutuhan
7. Organisasi fungsional dengan mekanis mekerja bagus
8. Demokratis, terbuka, kerja keras, dinamis, cerdas dan terpercaya

Dengan melihat ciri-ciri di atas, dimana Partai Demokrat merupakan partai yang sudah cukup kuat, dalam melakukan fungsi komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung sangat berperan dan mendukung sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya DPC Partai Demokrat Kota Bandung menuju partai yang mengedepankan demokrasi. Untuk menuju partai tersebut DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengadakan pendidikan politik kepada para anggotanya sebagai pemahaman dalam masalah politik yang diadakan pada saat rapat anggota, pemimpin dan pengurus DPC Partai Demokrat sering memberikan pendidikan politik sebagai salah satu agenda dalam rapat anggota tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan politik juga dirasakan masih kurang untuk menuju partai kader tersebut. Hal ini masih

diupayakan dengan cara lain yaitu dengan cara dilaksanakannya penyaluran komunikasi melalui media yang dirasakan cukup efektif, karena kadang dalam rapat tersebut pengurus partai mengalami kejenuhan.

Selain faktor-faktor pendukung tersebut, Partai Demokrat menjadi partai politik pilihan rakyat karena partai mempunyai:

1. Pemimpin dan anggota yang bisa dipercaya
2. Ideologi dan *Flatform* yang jelas
3. Kepedulian terhadap upaya perbaikan mutu kehidupan rakyat kecil
4. Kepedulian terhadap keamanan dan pertahanan negara
5. Kepedulian terhadap upaya penegakan hukum yang adil

Faktor-faktor tersebut diatas sangatlah mendukung dalam pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Karena sebagai partai politik pilihan rakyat, DPC Partai Demokrat Kota Bandung mempunyai peluang yang cukup kuat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah dan juga Partai Demokrat dapat menjadi partai politik yang sangat besar.

Berbagai sarana penghubung dengan anggota partai diadakan rapat-rapat. Rapat-rapat tersusun dalam urutan jenjang hierarki:

1. Kongres Partai
2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai
3. Rapat Koordinasi Umum
4. Rapat Koordinasi Wilayah
5. Rapat Koordinaasi Bidang
6. Rapat Alat Kelengkapan Partai
7. Konferensi Daerah Partai
8. Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai
9. Konferensi Cabang Partai
10. Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai
11. Musyawarah Anak Cabang Partai
12. Rapat Pengurus Anak Cabang Partai

Rapat-rapat ini dapat menciptakan hubungan yang dekat antara komunikator dengan komunikan. Anggota jadi mengenal, tidak hanya sekedar tahu siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dengan adanya rapat-rapat tersebut, sebagai sarana

paartisipasi anggota partisipan partai diharapkan dapat merubah budaya politik kaula sisa orba menjadi partisipan. Dengan adanya rapat koordinasi wilayah partai yang dilaksanakan setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan yang membahas tugas-tugas partai, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dibahas dan dianalisis untuk pengalaman selanjutnya ke depan. Rapat koordinasi wilayah partai di Partai Demokrat dapat menciptakan antara pimpinan dengan anggota cukup dekat, karena rapat koordinasi wilayah partai adalah rapat unsur DPP partai, dan unsur DPD partai atau unsur DPC partai yang membidangi wilayah tertentu dengan pimpinan kepengurusan di wilayahnya untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan tugas partai.

Struktur organisasi di Partai Demokrat mempunyai hierarki yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam menyampaikan pesan politik terhadap bawahannya, yaitu:

1. Dewan Pimpinan Pusat yang terdapat di tingkat Pusat
2. Dewan Pimpinan Daerah yang terdapat di tingkat Provinsi
3. Dewan Pimpinan Cabang yang terdapat di tingkat Kabupaten/ Kota
4. Pimpinan Anak Cabang yang terdapat di tingkat Kecamatan
5. Pimpinan Anak Ranting yang terdapat di tingkat Desa/Kelurahan

Dengan adanya jenjang hierarki struktural seperti itu, struktur organisasi di Partai Demokrat bersifat formal. Berdasarkan hasil wawancara, DPC Partai Demokrat Kota Bandung struktur organisasinya sudah cukup terpenuhi untuk menjalankan program partai. Struktur organisasi partai bersifat formal, hal itu dapat dilihat dari adanya tingkat struktural seperti adanya ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Dengan adanya Struktural tersebut dalam penyampaian komunikasi politik tidak membingungkan.

Selain itu, faktor-faktor pendukung dari keberhasilan Partai Demokrat adalah

adanya bantuan dana dari luar negeri. Tetapi bantuan dari luar negeri tersebut dapat diterima asalkan tidak keluar dari prosedur yang ditetapkan.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Komunikasi Politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung

Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, maka komunikasi di DPC Partai Demokrat Kota Bandung terjadi pada semua elemen bila dilihat dari unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver (1949) gangguan komunikasi itu terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC Partai Demokrat kota Bandung itu hanya pada masalah teknisnya saja.

Salah satu kunci keberhasilan proses komunikasi adalah kualitas atau kemampuan yang dimiliki pihak pemberi pesan (komunikator). Adanya timbal balik yang kurang sesuai dengan harapan DPC Partai Demokrat Kota Bandung sehubungan dengan pencapaian perolehan tujuan DPC Partai Demokrat Kota Bandung, adalah disebabkan oleh faktor pimpinan. Kemampuan kader partai yang berbeda-beda dalam mengkomunikasikan pesan, mengakibatkan transformasi informasi yang berbeda pula. Senjangnya tingkat pendidikan antara pemimpin dengan anggota sering mengakibatkan miskomunikasi. Tingkat pendidikan anggota yang rendah kurang mampu menangkap apa yang disampaikan oleh komunikator. Untuk itu komunikator dituntut untuk dapat menyesuaikan dan memahami hal tersebut. Di DPC Partai Demokrat Kota Bandung

terdapat kesenjangan pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan pula dari senjangnya ekonomi antara pemimpin dan anggota partai.

Dalam proses komunikasi tidak selamanya apa yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan dalam penafsiran itu sendiri dari komunikan. Disamping itu pula latar belakang pendidikan anggota partai yang berbeda-beda menyebabkan kemampuan dalam menerima dan mengolah pesan yang disampaikan berbeda-beda pula sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Anggota partai yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi akan dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan namun sebaliknya bagi anggota partai yang memiliki kemampuan tidak begitu cakap, maka akan menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan yang disampaikan.

Hal lain yang berhubungan dengan komunikan adalah kurangnya kemampuan dalam mengolah informasi. Hal tersebut dapat berpengaruh pula terhadap proses pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pimpinan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi terhadap proses komunikasi secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan anggota Partai Demokrat yang masih rendah. Hal ini jadi menghambat hubungan antara pemimpin dengan anggota partai.

Faktor sarana dan prasarana merupakan media yang dapat mempermudah proses pemahaman atas pesan yang disampaikan. Kesesuaian media yang digunakan dalam menyampaikan pesan akan berpengaruh terhadap kecepatan penerimaan dalam pemahaman pesan yang disampaikan oleh pimpinan. Hambatan komunikasi yang bersumber dari faktor sarana dan prasarana (media) di DPC Partai Demokrat Kota Bandung adalah kurangnya jumlah pesawat telepon yang ada di sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Bandung.

Apalagi yang berhubungan dengan saluran komunikasi berupa tatap muka yang kurang inovasi (monoton), akan mengakibatkan kurang efektifnya proses penyampaian pesan, bahkan sebaliknya tatap muka akan menjadikan satu beban bagi anggota untuk mengikutinya karena perasaan jenuh atau bosan. Dengan adanya ponsel model komunikasi tulisan jadi jarang dipergunakan.

Hal lain yang menghambat pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung adalah selama rezim orde baru berkuasa, proses rekrutmen kader, kaderisasi maupun konsolidasi macet total. Kegiatan politik dibatasi semuanya serba diatur oleh dan harus tunduk kepada kemauan penguasanya, akibatnya kemandirian partai runtuh, yang berkembang adalah bentuk-bentuk peyandaran diri pada penguasa. Sehingga dalam melakukan komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung untuk masa sekarangpun hal tersebut masih terbawa. Anggota lebih cenderung menyandarkan dirinya pada pemimpin (budaya politik kaula), anggota lebih mempercayai pemimpin dalam mengambil keputusan.

Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi yang terjadi di DPC Partai Demokrat kota Bandung, adalah:

1. Gangguan teknis
2. Rintangan status
3. Rintangan kerangka berpikir
4. Rintangan budaya

Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (*channel noise*). Pesawat telepon di DPC Partai Demokrat Kota Bandung kadang mengalami kerusakan hal ini sangat menghambat dalam komunikasi karena pesawat teleponlah media komunikasi yang dinilai cukup cepat untuk dapat langsung

diterima oleh komunikan. Kerusakan tersebut disebabkan keterlambatan dalam membayar telepon sehingga kadang dicabut oleh telkom. Dan juga jumlah pesawat telepon di sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Bandung jumlahnya hanya satu.

Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial diantara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara pemimpin dan anggota atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya, dan juga anggota Partai Demokrat yang kebanyakan pendidikannya masih rendah.

Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.

Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Anggota Partai Demokrat berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang budaya yang berbeda juga. Kader harus diberikan pembinaan baik dalam politik dan berkomunikasi sehingga menjadi calon pemimpin yang baik di masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kaderisasi tersebut. Selain itu, pelatihan-pelatihan bagi para kader partai masih sangat minim.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung lainnya berupa permasalahan-permasalahan yang timbul di partai. Permasalahan itu bisa berupa permasalahan ke dalam maupun keluar. Permasalahan ke dalam yang terjadi Partai Demokrat yang berpengaruh terhadap komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung meliputi:

1. Ideologi dan jati diri partai:
 - a. Lemahnya permasalahan dan

penjiwaan dari para kader partai terhadap ideologi dan jati diri partai mengakibatkan lemah atau kurang tanggunya para kader di dalam mengemban visi dan misi juang partai di saat dihadapkan kepada tantangan-tantangan berat, maupun guncangan-guncangan politik di arena juangnya. Tidak jarang terjadi, oleh adanya guncangan-guncangan politik sesaat, para kader kehilangan keseimbangan, kehilangan arah kiblat juangnya/visinya, sehingga gampang terombang-ambing dan terpengaruh serta menari-nari mengikuti irama orang lain. Hal ini disebabkan ketidakpahaman para anggota berpartisipasi dalam politik. Untuk itu DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengadakan pendidikan politik untuk pemahaman mereka. Biar komunikasi politik berjalan searah dengan apa yang diharapkan semua anggota partai.

b. Lemahnya pemahaman dan penjiwaan dari para kader partai terhadap jati diri dan ideologi partai, akan berakibat lemahnya para kader partai di dalam mengaplikasikannya pada kebijakan-kebijakan maupun program-program perjuangan partai. Oleh karenanya, masyarakat pun akan sulit mengenali, yang mana sebenarnya yang merupakan kiprah juang partai, dan yang mana yang bukan merupakan kiprah juang partai. Hal ini akan berakibat lanjut kepada lemahnya kemampuan partai untuk menarik simpati massa. Akibatnya proses komunikasi politik yang terjadi di DPC Partai Demokrat Kota Bandung ikut melemah. Dengan tidak jelasnya kiprah juang partai, pemimpin jadi bingung untuk menyampaikan pesan politik kepada anggota.

2. Masalah personil/ SDM partai:

Macetnya proses rekruting kader dan kaderisasi semasa rezim orde baru berkuasa, telah membawa akibat lanjut yang serius terhadap masalah

pengkaderan partai:

Kaderisasi/ pendidikan dan pelatihan

- a. Selama rezim orde baru berkuasa, kaderisasi boleh dikatakan tidak berjalan. Akibatnya, partai mengalami krisis SDM serius. Hal ini semakin terasa setelah partai memperoleh kemenangan dalam pemilu 1999, sehingga karenanya dituntut untuk mampu menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga-lembaga fungsional maupun struktural. Sementara di sisi lain, dihadapkan pada kenyataan kekurangsiapan SDM berkualitas, karena memang belum pernah bisa melaksanakan kaderisasi secara terarah dan terprogram.
- b. Yang terjadi adalah kaderisasi alami, yang pematangannya semata-mata oleh proses “pengalaman lapangan” tanpa lewat proses pendidikan dan pelatihan yang terarah, terprogram dan berjenjang.
- c. Belum adanya pedoman kriteria rekruting dan penjenjangan kader yang baku, ditambah macetnya proses kaderisasi dan regenerasi kader, telah mengakibatkan tidak jelasnya jenjang kader, yang berdampak lanjut rawan konflik internal, terutama disaat-saat partai melakukan penugasan kader di lembaga-lembaga struktural maupun fungsional, karena setiap kader merasa memiliki hak yang sama.
- d. Macetnya kaderisasi juga berdampak kepada lemahnya pemahaman dan penjiwaan kader partai terhadap ideologi, jati diri dan visi-misi juang partai.

Penugasan dan penegakan disiplin partai:

- a. Juklak-juklak partai yang digunakan sebagai pedoman baku untuk penugasan kader-kader partai di dalam lembaga-lembaga struktural maupun fungsional selama ini, dirasakan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan

agar bisa meminimalisasi konflik-konflik internal yang sering muncul dalam proses penugasan itu.

- b. Cepat munculnya Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu, sementara disisi lain dihadapkan kepada kekurangsiapan SDM partai secara kualitatif maupun kuantitatif, ditambah dengan jenjang kekaderan yang tidak jelas, serta belum mantapnya penjiwaan jati diri, ideologi maupun visi-misi juang partai oleh para kader partai, telah membawa akibat munculnya kader-kader yang arogan dan indisipliner, baik di lembaga struktural maupun fungsional, utamanya kader-kader yang ditugaskan di lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan.
 - c. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah belum tertatanya mekanisme kerja partai di dalam suatu jenjang, maupun antar jenjang partai. Juga mekanisme kerja antara lembaga partai dengan kader-kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan. Ada kaitannya dengan masalah konsolidasi personil, masalah mekanisme penugasan, pengendalian dan penegakkan disiplin partai bagi kader-kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan juga memerlukan perhatian serius partai.
3. Konsolidasi organisasi
- a. Salah satu permasalahan berat yang dihadapi partai di dalam proses konsolidasi organisasi adalah permasalahan yang berhubungan erat dengan masalah personil/ SDM. Di satu sisi, partai memiliki kader lama yang memiliki loyalitas yang sudah teruji oleh proses sejarah yang berat dan panjang, namun relatif lemah dari aspek kualitas kemampuan pikir, analisa dan ilmu pengetahuan, sementara dari sisi lain hadir kader baru yang dari segi kualitas, kemampuan pikir, analisa

dan ilmu pengetahuan relatif memadai, namun belum teruji loyalitas sebagai kader partai lewat proses perjalanan juang partai yang berat dan panjang.

- b. Pengembangan wawasan tentang demokrasi dan penegakan konstitusi harus juga mendapat perhatian serius partai, biasanya pemahaman demokrasi dan konstitusional sering membawa arus massa terjerumus ke dalam anarkisme. Dan ini bertolak belakang dengan demokrasi.

Selain hambatan-hambatan yang terjadi didalam partai juga terdapat hambatan yang timbul dari permasalahan eksternal yang terjadi di Partai Demokrat yang berpengaruh terhadap proses komunikasi di DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Permasalahan eksternal tersebut meliputi:

1. Labilnya sikap beberapa parpol dalam memegang komitmen, menambah kesulitan tersendiri bagi partai di dalam membangun kerjasama antar parpol termasuk juga Partai Demokrat.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dan sarana-prasarana penunjangnya, berbareng dengan munculnya gerakan separatistis di beberapa daerah, adalah merupakan tantangan politik berat bagi Partai Demokrat khususnya, dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya.
3. Proses globalisasi ekonomi yang berjalan sangat cepat yang belum terimbangi oleh kesiapan konsepsi ekonomi nasional dan SDM, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mengatasi krisis ekonomi moneter yang sudah sangat berkepanjangan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengikuti pola proses komunikasi yang sesuai dengan teori yang telah digambarkan dan dilaksanakan terus menerus, dimana komunikator politik yang terdiri dari para pengurus pimpinan baik ditingkat DPP, DPD, DPC sampai tingkat PAC dengan menggunakan media salah satunya adalah media televisi ataupun radio, telepon, memo, surat tugas dan sebagainya. Pesan itu berupa program-program kerja partai, perintah yang disampaikan kepada para anggota partai sebagai komunikasi dengan harapan para anggota dapat melaksanakan dengan baik program kerja partai yang telah ditetapkan bersama. Walaupun pelaksanaan fungsi komunikasi politik belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena masih ada terjadinya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan para anggota di DPC Partai Demokrat Kota Bandung yang masih rendah. Namun hal itu dianggap cukup berhasil terlihat dari perubahan DPC Partai Demokrat Kota Bandung.
2. Partai Demokrat sebagai partai politik yang tergolong besar, ini didukung oleh faktor-faktor pendukungnya antara lain kader partai yang cukup banyak. Disamping itu Partai Demokrat juga tidak mengesampingkan komunikasi mengenai program kerja, visi-misi, platform, ideologi dan faktor-faktor lainnya dan diadakannya pendidikan politik yang dimasukkan dalam agenda rapat anggota di DPC Partai Demokrat Kota Bandung.
3. Partai Demokrat untuk menjadi partai yang besar mendapatkan berbagai hambatan dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik. Hambatan itu ada yang datang dari dalam ada juga yang datang dari luar. Yang datang dari dalam salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang masih rendah tingkat pendidikannya sehingga sering menyebabkan miskomunikasi, sedangkan yang datangnya dari luar adalah faktor sejarah pada masa orde baru dimana kegiatan politik masih dibatasi. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap proses komunikasi di DPC Partai Demokrat Kota Bandung sebagai wakil di tingkat Kabupaten/ Kota. Kaderisasi yang sempat berhenti mengakibatkan krisis SDM yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanapiah. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryanto. (1998). *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Kartono, Kartini. (2003). *Pemimpin dan Kepemimpinan "apakah pemimpin abnormal itu?".* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kantaprawira, Rusadi. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Rudy, May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sanit, Arbi. (2003). *Menggugat Partai Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- S J, Suseno, Magnis, Franz. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1995. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.